

ISSN :
E-ISSN:
Volume 1 no 1. 2022
Pp : 15-18

JGAI
Journal of Governance and Administrative Issues

Editorial Office: Jln Tebet Raya No 2 Lt 3 Block C. Tebet barat, Tebet Jakarta Selatan Jakarta-Indonesia. E-mail: journal@scientium.ac.id scientium@scientium.ac.id Website: <https://scientium.co.id/journals/index.php/jgai>

MEMPERTIMBANGKAN MODEL DIALOG STRATEGIS DALAM MEMBANGUN SISTEM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) YANG LEBIH BAIK

Ryan S. Alam, Saiful Wathan

¹*Faculty of Economy and Business, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, email rysalamilmi@gmail.com*

²*Pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur, E-mail: saifulwathan@gmail.com*

Abstrak

Terjadinya kisruh pembuatan daftar pemilih tetap (DPT) pada beberapa kali pemilihan umum (pemilu) harus dapat ditangani dengan menerapkan *e-Government* yang terintegrasi dan terpadu. Berdasarkan studi literature, dapat disimpulkan bahwa DPT elektronik selama ini dibangun hanya berdasarkan pandangan *E-Government* secara sempit, yakni hanya seolah-olah berupa kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Dibutuhkan strategi berupa model dialog strategis yang justru menekankan peran utama manusia dan kemanusiaan, yang merupakan salah satu kunci sukses implementasi SIM dalam *E-Government*.

Kata kunci : Daftar Pemilih Tetap, Sistem, Model Dialog Strategis

A. Pendahuluan

Kisruh pembuatan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum (pemilu) masih terjadi, salah satunya adalah tahun 2009. Handiwidjojo *et al.* (2009) berpendapat bahwa hal tersebut dapat dihindari bila sistem *e-Government* yang dibangun didasarkan pada sistem informasi (SI) dan sistem basis data yang standar dan terintegrasi. Adapun kendala *e-Government* dapat terjadi bila pembangunan SI masing-masing departemen dan BUMN tersebut dilakukan tanpa adanya rencana dan rancangan induk yang disepakati bersama secara lintas departemental dan sektoral, sehingga dapat mempersulit dan memperlambat pembentukan sistem *e-Government* yang terintegrasi dan terpadu tersebut. Pemikiran Handiwidjojo *et al.* (2009) yang menyimpulkan bahwa sistem *e-Government* berdasarkan SI dan sistem basis data yang standar dan terintegrasi dapat menghindari kisruh pembuatan DPT untuk pemilu belum sesuai dengan harfiah manajemen sistem informasi (SIM) itu sendiri, sehingga gagasan untuk menangani kisruh tersebut (Handiwidjojo *et al.*, 2009) memadai melalui pemahaman secara komprehensif terhadap SIM, manajemen, dan sistem informasi. Hal ini sejalan dengan makna *e-Government* yang menurut Laudon

dan Laudon (2018, 84) mengacu pada penerapan internet dan teknologi jaringan agar hubungan pemerintah dan sektor publik, warga negara, bisnis, dan antar pemerintah lainnya terjalin secara digital, jelas sangat membutuhkan peran sumber daya manusia, sehingga jelas sangat mengabaikan faktor penting manusia dalam manajemen. Berikut adalah analisis yang dapat menunjang keberhasilan sistem *e-Government*, dimana ruang lingkupnya tetap berfokus pada SIM dan model yang berhubungan dengan SIM.

B. Metode

Studi ini mempergunakan literature review dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada. Hal ini sejalan dengan gagasan Ermel *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa sains yang dapat dianggap sebagai praktik kooperatif dan kumulatif dapat dibangun dan diorganisasikan secara sistematis, baik melalui penelitian orisinal atau tinjauan pustaka. Tinjauan literatur merupakan elemen penting dari setiap kegiatan penelitian akademik, yang secara luas merujuk pada upaya mengumpulkan dan mensintesis penelitian sebelumnya secara sistematis (Ermel *et al.*, 2021). Dalam hal studi ini, literature review tidak hanya memberikan pemahaman yang komprehensif dari studi sebelumnya pada suatu topik tetapi juga menghasilkan interpretasi integratif berdasarkan temuan yang lebih substantif daripada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dalam mengkaji literatur seringkali kurang teliti dan tidak dilakukan secara sistematis, yang menyiratkan kurangnya pengetahuan akibat minimnya literatur, sehingga menghasilkan studi yang dibangun di atas asumsi yang salah (Ermel *et al.*, 2021).

C. Analisis

Dalam membangun sistem *e-Government* yang dapat menghindari kisruh dalam pembuatan DPT untuk pemilu harus diawali dengan pemahaman makna SIM dan strategi implementasinya agar berdaya guna dalam pembuatan DPT Pemilu yang tidak menimbulkan kisruh.

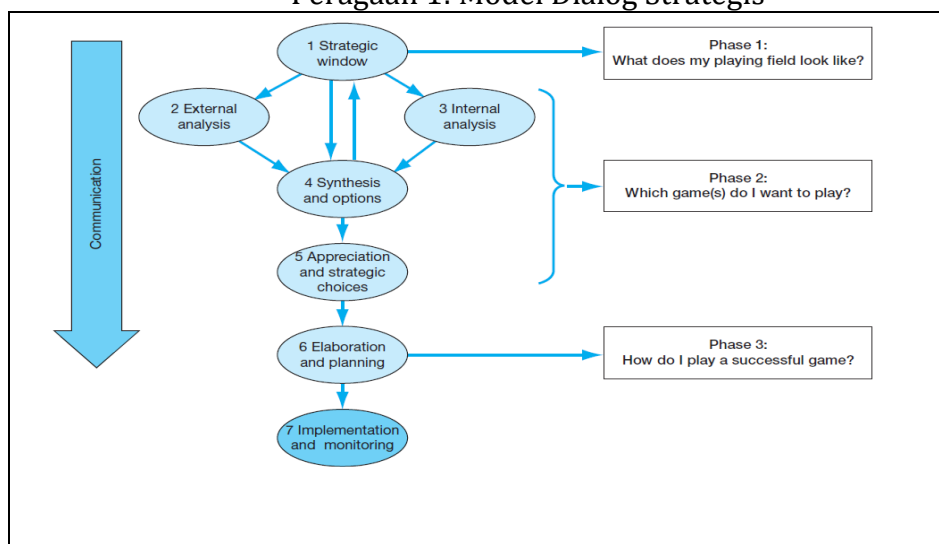
Terdapat beberapa pemikiran tentang SIM, yang antara lain pernah dikemukakan oleh Laudon dan Laudon (2018), Mcleod, dan Schell (2008), dan Kroenke dan Boyle (2017). Laudon dan Laudon (2018, 59) menyimpulkan bahwa dimensi manajemen SI melibatkan isu-isu seperti kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Mcleod, dan Schell (2008, 40-41) menyimpulkan SIM sebagai sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia untuk para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama yang dipergunakan oleh pemecah masalah (baik manajer dan profesional) untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah perusahaan. Adapun informasi yang diberikan oleh SIM menggambarkan hal-hal apa saja yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Adapun Kroenke dan Boyle (2017, 46-48) mendefinisikan SIM sebagai manajemen dan penggunaan sistem informasi yang dipergunakan untuk membantu organisasi dalam mencapai strateginya. Makna SIM sendiri tidak dapat terlepas dari pengertian manajemen, namun sering dikacaukan dengan terminologi teknologi informasi dan sistem informasi, yang jelas memiliki arti dan posisi yang berbeda. Manajemen berarti mengembangkan, memelihara, dan menyesuaikan apa yang disebut SI. Adapun SI merupakan kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang yang saling berelasi yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang

bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan suatu organisasi (Laudon dan Laudon, 2018, 44), sedangkan teknologi informasi (TI) mengacu pada produk, metode, penemuan, dan standar yang digunakan untuk tujuan menghasilkan informasi.

Adanya pemahaman SIM menunjukkan adanya 3 (tiga) elemen utama didalamnya, yakni manajemen dan penggunaan, SI, dan strategi (Kroenke dan Boyle, 2017, 47), sehingga bila diimplementasikan pada sistem *e-Government* dalam pembuatan DPT untuk pemilu, berarti tetap membutuhkan manusia, yang memang keterlibatannya melekat pada kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen, untuk membantu organisasi pemerintahan dalam menertibkan DPT. Agar diperoleh nilai yang berarti dan bermanfaat dalam penggunaan *e-Government*, yakni peningkatan penyampaian layanan pemerintah, pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien, pemberdayaan warga negara melalui pemberian akses yang lebih mudah ke informasi, dan kemampuan untuk membangun jaringan secara elektronik dengan warga negara lain (Laudon dan Laudon, 2018, 84), maka pemerintah sebagai organisasi harus mendukung investasi teknologinya dengan investasi pelengkap yang tepat dalam organisasi dan manajemen. Investasi pelengkap yang dimaksud mencakup model bisnis baru dan proses bisnis, budaya organisasi yang mendukung dan perilaku manajemen, dan standar teknologi, peraturan, dan undang-undang yang tepat, agar memungkinkan untuk menghasilkan pengembalian yang tinggi (Laudon dan Laudon, 2018, 60).

Selanjutnya tentang strategi sebagai salah satu faktor penting keberhasilan mengimplementasikan *e-Government* yang merupakan bagian dari SI, penting untuk menerapkan Model Dialog Strategis yang dikembangkan oleh Berenschot (Assen, Berg, dan Pietersma, 2009, 50-52). Model ini merupakan model 7 (tujuh) langkah umum dalam merumuskan dan mengembangkan strategi yang mengasumsikan bahwa strategi organisasi akan secara bersamaan dibagikan dan diinternalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas organisasi. Pemahaman terhadap 7 (tujuh) langkah umum Model Dialog Strategis digambarkan pada Peragaan 1 berikut:

Peragaan 1: Model Dialog Strategis



Artinya, agar *e-Government* dapat menghasilkan DPT pemilu yang tidak ricuh, tetap membutuhkan sentuhan kemanusiaan dalam strateginya mengingat strategi yang layak untuk menerapkan *e-Government* tidak hanya mengandalkan

kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur, tetapi juga akan selalu melibatkan orang-orang melalui adanya model dialog strategis tersebut.

D. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa DPT elektronik selama ini dibangun hanya berdasarkan pandangan *E-Government*, yang jelas merupakan bagian dari SI, secara sempit menjadi seolah-olah hanya kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Hal ini dapat menyebabkan ricuhnya DPT Pemilu pada pemilu berikutnya. Dibutuhkan strategi berupa model dialog strategis yang justru menekankan peran utama manusia dan kemanusiaan, yang merupakan salah satu kunci sukses implementasi SIM dalam *E-Government*.

Daftar Pustaka

- Assen, M.V., Berg, G. V. D., and Pietersma, P. (2009). *Key Management Models*. Harlow: Prentice Hall.
- Ermel, Ana Paula Cardoso, Lacerda, D. P., Morandi, Maria Isabel W. M., dan Gauss, Leandro. (2021). *Literature Reviews*. Cham: Springer Nature Switzerland AG.
- Handiwidjojo, Winnie, Budi Sutedjo, dan Dharma Oetomo, Integrasi Basis Data Syarat Mutlak Pembangunan Sistem Informasi E-Government, Seminar Nasional Informatika 2009 UPN "Veteran" Yogyakarta, 23 Mei 2009, ISSN: 1979-2328, tersedia di laman <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/viewFile/938/800>, diunduh pada tanggal 6 Maret 2019.
- Kroenke, David M., dan Boyle, Randall J. (2017). *Experiencing MIS*. Essex: Pearson Education Limited.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Essex: Pearson Education Limited.
- Mcleod, Raymond, dan Schell, Jr. George P. (2008). *Management Information Systems*. New Delhi: Pearson Education, Inc dan Dorling Kindersley Publishing, Inc.